

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar penting dalam kehidupan bernegara, pendidikan adalah salah satu langkah untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan terampil. Bunyi dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dari penjelasan Undang-undang tersebut jelaslah bahwa pendidikan bermaksud untuk menciptakan warga negara yang memiliki kecerdasan dan keterampilan dan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai agama, kebudayaan Indonesia dan peka terhadap tuntutan zaman.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran wajib di tingkat persekolahan Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu mempersiapkan Siswa menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran PPKn secara umum adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*) Seperti dikemukakan Aziz Wahab (2011, hlm.330) : Selain membentuk warga negara yang baik (*good citizen*), PPKn harus pula menghasilkan warga negara yang cerdas dalam menghadapi lingkungannya. Tujuan pembelajaran PPKn sesuai dengan bunyi

Pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kemudian pendidikan termasuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ide, gagasan serta perencanaan pembelajarannya dibentuk ke dalam kurikulum sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No.20 tahun 2003. Hamalik (2007, hlm.18) menyatakan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan aktifitas belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru, selalu bermula dan bermuara pada komponen-komponen pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum.

Keberhasilan pembelajaran PPKn tidak terlepas dari pengembangan kurikulum. Pengembangan Kurikulum menurut Seller dan Miller (1985, hlm.247-248) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang meliputi Orientasi, Pengembangan, Implementasi dan Evaluasi. Seller memandang pengembangan kurikulum harus dimulai dari tahapan orientasi yakni kebijakan-kebijakan yang meliputi enam aspek : tujuan pendidikan, pandangan tentang anak, pandangan tentang proses pembelajaran, pandangan tentang lingkungan, konsepsi peranan guru dan evaluasi. Berdasarkan orientasi, selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam bentuk proses pembelajaran dan evaluasi. Dari pendapat seller tersebut, pengembangan kurikulum adalah pengembangan komponen-komponen untuk membentuk sistem serta proses pembelajaran pada kurikulum itu sendiri.

Pengembangan kurikulum di Indonesia kini sudah memasuki pada era kurikulum 2013. Dengan tuntutan bahwa pendidikan haruslah menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan, kebiasaan, sikap dan keterampilan yang berakar pada budaya bangsa, maka mulai pertengahan tahun 2013 digulirkan

lah implementasi kurikulum 2013 sebagai bentuk pengembangan kurikulum. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Dalam Permendikbud No.70 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 dijelaskan bahwa Secara konseptual, kurikulum 2013 adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum 2013 adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, Kurikulum 2013 adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajarannya. Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud No.81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013, meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan untuk semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran PPKn. Pendekatan Saintifik diharapkan mampu melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi dan terstruktur. Dalam implementasi kurikulum 2013, istilah pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik pada pelaksanaan pembelajaran menjadi bahan pembahasan yang menarik perhatian para pendidik karena di tingkat pendidikan menengah belum banyak menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis setara dengan kemampuan siswa dari bangsa lain.

Penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 ayat 1 dan 2 Tahun 2003 bahwa : Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat ; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pendekatan saintifik menjadi sebuah tantangan bagi guru melalui pengembangan aktivitas siswa yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Seperti dipaparkan oleh petunjuk teknis Implementasi Kurikulum 2013 tentang pendekatan saintifik bahwa Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. maka, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Adapun dalam Permendikbud no 81A tahun 2013, Proses pembelajaran tersebut disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut :

1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.
2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.
3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.
4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran.
5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran.
6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

mengacu pada kriteria pendekatan saintifik tersebut maka guru-guru sudah sewajarnya dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam memfasilitasi siswa agar terbiasa berpikir logis, sistematis, dan ilmiah. Tentunya hal ini memerlukan peningkatan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik terlebih karena pendekatan ini telah sah dijadikan acuan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah.

Pada kenyataannya Pembelajaran dengan pendekatan saintifik masih belum diterapkan secara menyeluruh oleh para guru mata pelajaran PPKn di

Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Berdasarkan jajak pendapat kepada siswa di salah satu sekolah, peneliti masih menemukan anggapan bahwa Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pelajaran yang membosankan karena pembelajarannya yang cenderung bersifat hafalan. Tanggapan siswa tersebut disebabkan karena faktor guru yang masih menggunakan cara-cara konvensional dalam mengajar sehingga menyebabkan siswa kurang tertarik mempelajari PPKn. Selain tanggapan siswa, peneliti pun menemukan respon dari guru atas pendapat dari siswa terkait kegiatan pembelajaran di kelas. Guru mengkonfirmasi bahwa hal tersebut memang benar adanya dikarenakan belum menemukan dan masih mencari strategi yang efektif dalam melaksanakan pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Itulah mengapa guru lebih memilih cara-cara tradisional dalam menyampaikan pelajaran di kelas.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti ingin mencoba mengkaji **Bagaimana Penerapan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran PPKn**, peneliti memiliki keyakinan melalui pembelajaran pendekatan saintifik ini siswa sebagai generasi penerus bangsa akan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan juga mengembangkan karakter dan watak yang diharapkan sebagai *output* pembelajaran PPKn.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Penerapan Kurikulum 2013 yang masih menyimpan berbagai masalah terutama pada muatan dan proses pembelajaran yang tepat guna menghasilkan *output* pembelajaran PPKn yang diharapkan.
2. Kualitas proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang belum optimal berdampak pada kurangnya minat siswa dalam pelajaran PPKn, sehingga kurangnya pengamalan dan aplikasi materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menjadi warga negara yang baik.
3. Kondisi yang ada di lapangan khususnya pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan guru kurang optimal dalam memanfaatkan maupun mengembangkan sumber pembelajaran, karena pembelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang cenderung masih berpusat pada guru (*teacher centered*). Guru masih mendominasi proses pembelajaran sedang siswa masih nampak pasif.

4. Isu Penghentian sementara Pelaksanaan Kurikulum 2013 membuat beberapa sekolah di Indonesia menggunakan kembali sistem pembelajaran pada Kurikulum Sebelumnya.

### **C. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini secara umum, yaitu: “Bagaimana Penerapan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran PPKn”.

Adapun secara khusus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Permendikbud No.65 Tahun 2013 dalam Pembelajaran PPKn di SMA Alfa Centauri Bandung dilaksanakan ?
2. Bagaimana Implementasi Permendikbud No.66 Tahun 2013 dalam pembelajaran PPKn di SMA Alfa Centauri dilaksanakan ?
3. Apa Kendala yang dihadapi Guru pada penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ppkn ?
4. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala pada penerapan pendekatan saintifik ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran dengan pendekatan ilmiah, melalui Studi Deskriptif Analisis terhadap implementasi kurikulum 2013 di Sekolah

Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu temuan bahwa pendekatan ilmiah merupakan metode yang baik diterapkan dalam rangka membentuk warga negara yang baik dan cerdas sebagai *output* dari pembelajaran PPKn di Sekolah

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan analisis tentang Implementasi Pendekatan Saintifik pada pembelajaran PPKn.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini jika dilihat dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan mengenai Pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah.

## **2. Secara Kebijakan**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan adalah mengawal proses pembuatan kebijakan berkenaan dengan strategi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik itu dilakukan melalui perundingan guru mata pelajaran dengan pihak sekolah, maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan dengan pihak Dinas Pendidikan dalam rangka menghasilkan *output* pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diharapkan.

## **3. Secara Praktis**

Adapun beberapa manfaat dari segi praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Guru dan Pihak Sekolah**

Setelah diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi serta masukan bagi guru dan sekolah yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian ini, serta sekolah-sekolah lain pada umumnya mengembangkan Strategi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Selain itu, dengan strategi yang tepat dalam pendekatan saintifik ini pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih sistematis, terarah, dan ilmiah.

### **b. Siswa**

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah melalui tahapan tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan.

### **c. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi keilmuan bagi departemen Pendidikan Kewarganegaraan terkait Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

#### **d. Penulis**

Diadakannya penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman berpikir dan memecahkan masalah serta mempersiapkan strategi yang tepat dalam mewujudkan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tindakan yang nyata.

#### **e. Secara Isu atau Aksi Sosial**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya suatu motivasi bagi guru dalam menentukan strategi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini diupayakan menjadikan strategi pembelajaran dalam pendekatan saintifik menjadi ideal . Sehingga siswa termotivasi untuk lebih tertarik dan menyukai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah siswa.

### **F. Sturktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang tata urutan dari setiap bab dan bagian bab skripsi mulai dari bab satu hingga bab terakhir. Skripsi ini terdiri atas lima bab, pada bab satu sebagai pendahuluan dipaparkan mengenai latar belakang masalah,identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bab dua merupakan kajian pustaka dipaparkan teori dan konsep pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta konsep pendekatan ilmiah pada pembelajaran. Pada bab tiga dipaparkan mengenai pendekatan dan metode penelitian,teknik pengumpulan data,operasionalisasi variabel,populasi dan sampel, instrumen penelitian,pengujian data,tahap penelitian, serta teknik pengolahan dan analisa data. Pada bab empat dipaparkam mengenai deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data hasil penelitian,pengujian data dan pembahasan hasil penelitian. Sementara itu, pada bab lima dipaparkan mengenai hasil penelitian dan saran.